

SKRIPSI

PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERIZINAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA PEKANBARU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral *Comprehensive*
Sarjana S1 Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH :

RENGGA DWI PUTRA
NIM. 10875003126

PROGRAM S1

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERIZINAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

Rengga Dwi Putra

Penelitian ini dilakukan pada Badan Usaha khususnya Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan yang melakukan perizinan pengeboran air bawah tanah di Kota Pekanbaru serta pegawai yang bekerja pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup dalam perizinan pengeboran air bawah tanah serta faktor penghambat pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup dalam perizinan pengeboran air bawah tanah di Kota Pekanbaru. Penentuan jumlah sampel dari Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan yang melakukan perizinan pengeboran air bawah tanah di Kota Pekanbaru dengan menetapkan sampel 10 % menggunakan rumus Slovin sehingga di dapatkan 51 Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan dari jumlah populasinya sebanyak 105 Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan, sementara itu sampel yang diambil dari pegawai pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dengan menggunakan tehnik Purposive sampling sehingga di dapatkan 7 orang pegawai. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data skunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket, dan, wawancara. Tehnik analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif yaitu, dalam bentuk tabel-tabel serta penggambaran melalui hasil wawancara di lapangan dengan melihat jawaban responden terhadap pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup dalam perizinan pengeboran air bawah tanah di Kota Pekanbaru serta, langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan pengawasan dalam bentuk persentase dan data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan permasalahan yang ada dan, memberikan interprestasi terhadap hasil yang relevan kemudian diambil kesimpulan. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup dalam perizinan pengeboran air bawah tanah di Kota Pekanbaru sesuai dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung adalah belum optimal. Dimana faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, yaitu meliputi, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran dari Pemerintah Daerah, serta tidak adanya sanksi tegas dari pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kesabaran dan karunianya, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, ***Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru.*** Salawat beserta salam kita ucapkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita dalam mengarungi dalam kehidupan yang fana ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Beliau yang senantiasa mendoakan dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus memberikan bantuan moril maupun materil kepada ananda yakni Ayahanda **Drs. Jonni, M.Pd** tercinta dan Ibunda **Dra. Yulia** yang tetap hidup dihati sanubari serta kakak dan adekku tercinta (**Lucy Oktavani. S,pd, Sylfitri Vadilla, Reza Al_fikri dan, Aditya Al_hadit**) serta keluarga besar ananda di Pekanbaru.
2. Bapak **Prof. DR. H. M. Nazir Karim, MA** selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak **DR. Mahendra Romus, SP, M.Ec** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

4. Bapak **Drs. Almasri, M.Si** selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, dan pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dalam memberikan masukan dan kritikan yang membangun tentunya demi kesempurnaan skripsi ini, seluruh Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan khususnya Keluarga besar Jurusan Administrasi Negara.
5. Bapak **Rusdi. S,Sos. MA** selaku sekretaris jurusan administrasi Negara dan bapak **Afrizal. S,Sos. M,Si** selaku dosen konsultasi proposal yang telah meluangkan waktu dalam memberikan masukan dan kritikan yang membangun di dalam proposal terdahulu.
6. Bapak **Drs. Adriman. M,Si** selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Bapak **Drs. Hardiwan** selaku Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dan segenap pegawai, terima kasih atas semua perhatian dan bantuannya.
7. Kawan-kawan seperjuangan penulis yang ada di Jurusan Administrasi Negara lokal A Semester 7 (Tujuh) dan yang lainnya terutama buat, **Desta Rio Sadi.S.Sos, Diki Idul Putra.S.Sos, M. Fahnurizan.S.Sos, Amrullah Sasita.S.Sos, Adi Supardi.S.Sos, Andika Ramadhan.S.Sos, Ahmad Rianto.S.Sos, Doni Alamsyah.S.Sos, Mansur Ahmad.S.Sos. Rian Sadi, Dirga Pratama, Akhirudin, Rusman Arif, Yuhelmi, Ari Firnanda dan, Afri Sandi** yang telah mendukung, membantu dan memotivasi, terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan atas kerja sama dan bantuan yang sangat membangun demi penyelesaian

skripsi ini, semoga suatu hari nanti tuhan mendengar dan membalas jasa kalian semua.

8. Buat kawan-kawan (**No_Cenk Auto Club**) **Ade, Randi, Bang Eko, Faja, Imam, Ook, Surya, Lutunk, Novra, Novri, Yogi**, semoga sukses selalu dan lebih baik lagi di kemudian hari.
9. Buat kawan-kawan seangkatan dan Anggota **HMJ Administrasi Negara** dan **BEM Fekosos**, terima kasih banyak penulis ucapkan kepada kalian semua, teruslah maju dan tingkatkan prestasi.
10. Buat umi dan keluarga,(**Reno Atdatul Rama, Ayahanda Markhairis, Ibunda Yuli Marnis**) terima kasih atas semua dukungan yang menjadi motivasi penulis untuk mengarungi kehidupan ini. Ucapan terima kasih tak kan cukup dalam peluh dan doa, untuk perhatian semuanya ananda ucapkan terima kasih banyak dan kasih sayang umi selalu abi rindukan sampai kehidupan ini menutup.

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin.

Pekanbaru, Januari 2012

Penulis,

Rengga Dwi Putra

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Batasan Permasalahan	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kegunaan Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	9

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1 Pelaksanaan Pengawasan	11
2.2 Perizinan Air Bawah Tanah	16
2.3 Konsep Operasional	23
2.4 Teknik Pengukuran	24
2.5 Hipotesis	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	27
3.3 Populasi Dan Sampel	27
3.4 Jenis Data.....	30

3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Analisa Data	31

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Letak Geografis Kota Pekanbaru	32
4.2 Klimatologi Dan Hidrologi	33
4.3 Sejarah Singkat Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru	33
4.4 Kedudukan Organisasi	34

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden	54
5.2 Pengawasan Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Oleh Badan Lingkungan Hidup Pada Badan Usaha Perhotelan Dan Penginapan Di Kota Pekanbaru	55
5.3 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru	80

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	83
6.2 Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jenis Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru Tahun 2008 s/d 2011.....	6
Tabel 3.1	Penentuan Jumlah Populasi Dan Sample.....	30
Tabel 5.1	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin....	54
Tabel 5.2	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Umur....	54
Tabel 5.3	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	55
Tabel 5.4	Tanggapan Responden Menegenai Inpeksi / Tinjauan Langsung BLH Terhadap Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah	60
Tabel 5.5	Tanggapan Responden Menegenai Kelengkapan Surat Tugas BLH Dalam Melakukan Inpeksi Langsung	61
Tabel 5.6	Tanggapan Responden Menegenai Kelengkapan Persyaratan / Dokumen Dan Fasilitas Dalam Pengeboran Bawah Tanah.....	61
Tabel 5.7	Tanggapan Responden Menegenai Ketepatan Waktu Inpeksi Langsung Oleh BLH Terhadap Pelaksanaan Pengeboran Air Bawah Tanah.....	62
Tabel 5.8	Tanggapan Responden Menegenai Kendala Dalam Pelaksanaan Inpeksi Langsung.....	63
Tabel 5.9	Tanggapan Responden Menegenai Pelanggaran Terhadap Ketentuan Perizinan.....	63
Tabel 5.10	Rekapitulasi Tanggapan Responden Dilihat Dari Indikator Inpeksi Langsung	64
Tabel 5.11	Tanggapan Responden Menegenai Pengetahuan Terhadap Perda Kota Pekanbaru No 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.....	66

Tabel 5.12	Tanggapan Responden Mengenai Pelaporan Badan Usaha Penginapan Dan Perhotelan Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah.....	66
Tabel 5.13	Tanggapan Responden Mengenai Badan Usaha Penginapan Dan Perhotelan Yang Tidak Melakukan Perazinan Pengeboran Air Bawah Tanah.....	67
Tabel 5.14	Tanggapan Responden Mengenai Ketepatan Waktu Pelaporan Setiap Badan Usaha Penginapan Dan Perhotelan Untuk Memperoleh Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah....	68
Tabel 5.15	Tanggapan Responden Mengenai Kelengkapan Data Dan Informasi Yang Diberikan Oleh Badan Usaha Penginapan Dan Perhotelan Kepada BLH....	68
Tabel 5.16	Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Tegak Yang Dikenakan Kepada Badan Usaha Yang Tidak Mengurus Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah.	69
Tabel 5.17	Rekapitulasi Responden Dilihat Dari Indikator Laporan Dari Tempat.....	70
Tabel 5.18	Tanggapan Responden Mengenai Tindakan Nyata Secara Tertulis Oleh BLH Kepada Badan Usaha Yang Tidak Mengurus Perizinan	71
Tabel 5.19	Tanggapan Responden Mengenai Peringatan / Teguran BLH Kepada Badan Usaha Yang Tidak Mengurus Perizinan.....	72
Tabel 5.20	Tanggapan Responden Mengenai Badan Usaha Yang Langsung Mengurus Perizinan Setelah Diberikan Surat Teguran	73
Tabel 5.21	Tanggapan Responden Mengenai Surat Teguran Dari BLH Kepada Badan Usaha Yang Tidak Melakukan Perpanjangan Izin	74

Tabel 5.22	Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Pengawasan Tidak Langsung Secara Tertulis.....	74
Tabel 5.23	Tanggapan Responden Mengenal Kegiatan Penyuluhan BLH Tentang Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah	76
Tabel 5.24	Tanggapan Responden Mengenal Ketersediaan Anggaran Dalam Kegiatan Penyuluhan Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah.....	77
Tabel 5.25	Tanggapan Responden Mengenal Rutinitas Penyuluhan Yang Dilakukan BLH Terhadap Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah	78
Tabel 5.26	Tanggapan Responden Mengenal Kerugian / Resiko Yang Terjadi Jika BLH Tidak Melakukan Penyuluhan	78
Tabel 5.27	Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Pengawasan Tidak Langsung Secara Lisan	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya air adalah karunia Tuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Mengingat fungsi air dalam kehidupan maupun pembangunan yang tidak bisa digantikan dengan unsur lain, maka dimanapun di dunia ini diakui bahwa air merupakan kekayaan alam yang menjadi hajat hidup orang banyak. Ungkapan, tanpa air tidak ada peradaban dapat menjelaskan betapa vitalnya air bagi kehidupan manusia. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 diamanatkan bahwa, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Disini dapat diartikan mengandung pengertian bahwa air merupakan milik bersama yang harus diatur secara adil.

Kebijakan publik merupakan bagian dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk rakyatnya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang sesuai dengan makna dasarnya yakni dari, oleh dan untuk rakyat diperlukan implementasi yang sesuai dengan keadaan masyarakat setempat melalui desentralisasi yang diwujudkan perannya oleh pemerintah daerah yang dianggap lebih mengenal dan lebih dekat dengan masyarakat lokal.

Semenjak diberlakukanya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, masyarakat menaruh harapan besar terhadap implementasi otonomi daerah itu, kehadiran otonomi daerah merupakan cahaya baru, angin

segar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan otonomi daerah berarti daerah diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan mengatur rumah tangganya sendiri. Begitu juga halnya dengan Badan Lingkungan Hidup yang diatur melalui, Perda Kota Pekanbaru No 9 Pasal 14 Tahun 2008 yaitu, Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebahagian urusan pemerintah daerah kota dalam bidang lingkungan hidup, maka realisasi nyata seperti apa yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam mengemban tugas dan fungsinya tersebut.

Kebutuhan akan air bagi berbagai keperluan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya pembangunan di berbagai sektor. Di sisi lain, sumber-sumber air untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan semakin langka atau mengalami penurunan (*degradasi*) baik jumlah maupun mutunya, sehingga dapat menimbulkan krisis air di berbagai daerah di Indonesia termasuk Kota Pekanbaru. Dalam upaya mengatasi krisis air diperlukan kebijakan dan pengaturan serta peran aktif masyarakat dalam pengelolaan air yang dapat menjaga kesinambungan ketersediaan air untuk jangka panjang guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan pembangunan. Salah satu komponen yang sangat perlu diperhatikan pada sistem penyediaan air bersih adalah sumber air karena tanpa sumber air maka tidak mungkin dapat diproduksi air bersih. Dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah.

Pengambilan air bawah tanah akan mempengaruhi terhadap ketersediaan air bawah tanah dan kondisi lingkungan keberadaannya. Apabila jumlah pengambilan air bawah tanah tidak diketahui dan ternyata telah melampaui batas keseimbangan antara ketersediaan air dengan jumlah pengambilannya, maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif tersebut dapat berupa penurunan jumlah maupun mutu air bawah tanah. Pengelolaan air bawah tanah yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, serta pemanfaatannya yang berlangsung secara berkelanjutan perlu dibudidayakan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengawasan terhadap jumlah pengambilan air bawah tanah dalam kurun waktu tertentu. Informasi jumlah pengambilan air bawah tanah diperoleh melalui pelaporan pengambilan air bawah tanah dari setiap titik pengambilan. Perkembangan yang pesat dalam pembangunan perumahan, industri, pertanian, infrastruktur, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, serta peningkatan jumlah penduduk, memberikan konsekuensi kepada peningkatan pasokan kebutuhan akan air.

Pasokan kebutuhan air yang selama ini barang kali belum sepenuhnya tercukupi oleh air perpipaan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dengan meningkatnya kebutuhan tersebut, menambah beban di dalam penyediaan pasokan air. Ketersediaan pasokan air untuk memasok suatu kebutuhan, merupakan faktor paling penting yang menentukan berkembangnya suatu kawasan tertentu, karena air adalah sumber kehidupan bagi penghuni maupun penunjang semua aktivitas kawasan. Oleh sebab itu ketersediaan pasokan air adalah mutlak.

Namun di sisi lain seperti disinggung di atas, pasokan air tersebut tidak atau belum dapat mengandalkan sepenuhnya kepada jaringan PDAM yang ada karena beberapa keterbatasan. Kondisi yang seperti ini memaksa para perencana pembangunan dan para pengembang suatu kawasan untuk mencari sumber-sumber lain untuk penyediaan pasokan air, salah satunya karena beberapa kelebihan yang dimiliki dari pada sumber air yang lain, adalah berasal dari air tanah. Namun apabila penggunaan atau pemanfaatan sumber daya air tanah dilakukan secara berlebihan tanpa mendasarkan pada potensi sumber daya air tanah itu sendiri akan menimbulkan dampak negatif berupa degradasi jumlah dan mutu air tanah maupun terhadap lingkungan sekitar.

Oleh sebab itu diperlukan pengawasan terhadap pemanfaatan air bawah tanah serta satu perencanaan yang menyeluruh mempertimbangkan seluruh faktor pengaruh sebelum pengembangan air tanah dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan akan air bagi berbagai keperluan. Ketersediaan air yang makin langka serta degradasi mutunya dewasa ini, sementara di sisi lain kebutuhan akan air yang selalu meningkat, memberikan konsekuensi perlunya suatu pengawasan yang baik dan dapat dijalankan.

Pengawasan ini untuk menjamin bahwa sumber yang makin langka tersebut agar dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin serta dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak, terutama bagi masyarakat miskin. Pengawasan yang memihak bagi kemanfaatan kaum miskin dan lemah, saat ini sangat diperlukan untuk mengangkat harkat hidup kaum terpinggirkan. Karena pengawasan kebutuhan tersebut adalah bagian yang integral dari

pengelolaan sumber daya air, maka pengawasan tersebut juga harus sesuai dengan asas pengelolaan sumber daya air. Krisis ekonomi dan era reformasi memberikan konsekuensi perubahan paradigma pengelolaan sumber daya air di Indonesia, yang tentu saja juga memberikan pengaruh dalam perencanaan kebutuhan air. Intinya adalah, bahwa saat ini perencanaan kebutuhan akan air dari sumber air tanah menjadi semakin kompleks tidak hanya didasarkan atas hal-hal yang bersifat teknik, tetapi mungkin justru yang paling penting adalah hal-hal yang bersifat sosial.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu pusat pengembangan di wilayah bagian barat Indonesia telah mengalami kemajuan pembangunan yang pesat. Kondisi yang demikian ini dapat dilihat secara nyata di berbagai sektor, terutama industri, perdagangan dan jasa yang terus berkembang pesat bersamaan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat pula. Seiring dengan kemajuan pembangunan di Kota Pekanbaru saat ini, peranan air bawah tanah dalam menunjang pembangunan menunjukkan peningkatan yang pesat. Air bawah tanah telah terbukti menjadi sumber daya alam pilihan bagi berbagai keperluan penyediaan air di daerah ini.

Penduduk Kota Pekanbaru sekarang cenderung memanfaatkan air bawah tanah karena keterbatasan air perpipaan (PDAM), baik untuk keperluan rumah tangga maupun keperluan yang sifatnya ekonomis/komersil. Sedangkan pemanfaatan air permukaan (selain untuk PDAM Tirta Siak Pekanbaru), berupa air sungai maupun danau sangat terbatas pada masyarakat yang tinggal dekat dengan sungai atau danau tersebut.

Akibat pemakaian air bawah tanah yang besar dan terus menerus, dapat menyebabkan terjadinya degradasi terhadap sumber-sumber air bawah tanah. Apalagi jika pembangunan tidak mengindahkan tata ruang yang ada, dalam jangka panjang jika tidak dilakukan upaya pengelolaan air bawah tanah secara baik, dikhawatirkan akan terjadi krisis air bersih di Kota Pekanbaru. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan menyeluruh terhadap sumber daya air. Berikut ini adalah data nama Badan Usaha yang mengurus perizinan pengeboran air bawah tanah dan yang tidak mengurus perizinan pengeboran air bawah tanah.

Tabel I.1 : Jenis Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru Tahun 2008 – 2011

No	Jenis Usaha	2008		2009		2010		2011		Jumlah	
		Izin	Non Izin	Izin	Non Izin	Izin	Non Izin	Izin	Non Izin	Izin	Non Izin
1	Cucian Dan Kolam Renang	35	19	35	14	16	11	13	9	99	53
2	Perdagangan	5	9	9	12	10	9	8	5	32	35
3	Rumah Makan Dan Restoran	10	15	6	17	2	13	-	11	18	56
4	Hotel	19	23	21	21	4	10	4	3	48	57
5	Rumah Sakit	7	-	3	-	-	-	1	-	11	-
6	Perkantoran	1	12	3	13	13	17	7	15	24	57
Jumlah Keseluruhan :										232	258

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru 2011.

Berdasarkan latar belakang di atas dan keterangan gejala-gejala yang terjadi sebagai mana di jelaskan maka peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul “ **PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERIZINAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA PEKANBARU** ”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru.
2. Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru.

1.3 Batasan Permasalahan.

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan batasan masalah. Adapun batasan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, hanya pada Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan di Kota Pekanbaru. Adapun alasan peneliti melakukan batasan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Batasan masalah dilakukan karena cakupan badan usaha yang ada di Kota Pekanbaru sangat banyak sehingga penulis hanya menfokuskan penelitian terhadap pengawasan perizinan pengeboran air bawah tanah bagi Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan di Kota Pekanbaru.
2. Batasan masalah dilakukan agar dapat mengefesiensikan waktu, tenaga dan biaya peneliti.
3. Batasan masalah dilakukan focus kepada Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan dikarenakan pada badan usaha tersebut umumnya secara keseluruhan memanfaatkan air bawah tanah.

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentulah mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan yang ingin diketahui, adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk Menganalisis Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru.

1.5. Kegunaan Penelitian.

1.Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu administrasi yang berhubungan dengan konsep imlementasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah serta dapat memperkaya khasana ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi Pemerintahan pada umumnya.

2.Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat berguna kepada pengambil kebijakan dalam menemukan solusi yang bermanfaat khususnya pada Badan Lingkungan Hidup dalam upaya melakukan kebijakan seta pelayanan dan tugas terbaik di masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan yang mana terdiri atas enam bab dan sub bab antara lain meliputi :

BAB I PENDAHULUAN.

Dalam bab ini akan dibahas masalah yang berhubungan dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian ini serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN.

Dalam bab ini penelitian berisikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.

Dalam bab ini akan dibahas tentang sejarah singkat Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, yang penulis teliti serta struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup, dan jenis kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru .

BAB V HASIL PENELITIAN.

Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini.

BAB VI PENUTUP.

Dalam bab ini akan diberikan suatu kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

TELAAH PUSTAKA

“ Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya ”

Pengawasan yang paling efektif hendaknya adalah yang datang dari diri sendiri. Al Qur'an telah memberikan petunjuk, bahwa kita memang tidak sedikit pun bisa lepas dari pengawasan Allah, di dalam islam juga terdapat berbagai penjelasan mengenai pengawasan, dimana pengawasan yang hakiki hanyalah milik Allah SWT, serta pengawasan yang dilakukan oleh manusia terhadap diri dan lingkungannya tentunya memiliki ketebatasan.

Menurut As ad (2000:65), Pelaksanaan tugas adalah, hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang menurut ukuran berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Menurut Winardi (2000:585) Pengawasan adalah, semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Swasta (1996:216), Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Menurut Komaruddin (1994:104), Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti. Lebih lanjut menurut Kadarman (2001:159), Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, apakah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya perusahaan telah digunakan

seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan. Untuk mengamati pengaruh dari pemenuhan kebutuhan terhadap sumber pasokan serta lingkungan sekitar, maka semua dalam perencanaan sudah harus menetapkan bagaimana pemantauan, termasuk pengawasan, nantinya dijalankan.

Sedangkan menurut Kansil (2002 : 12), Fungsi pengawasan itu penting untuk menjamin terlaksananya kebijaksanaan pemerintah dan perencanaan pembangunan pada umumnya. Dalam organisasi pemerintah, pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin.

1. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
2. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah meliputi :

1. Pengawasan umum.

Pengawasan umum itu dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik.

2. Pengawasan preventif

Dimana mengharuskan setiap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu berlaku sesudah mendapat pengawasan.

3. Pengawasan refresif

Menyangkut penangguhan atau pembatalan peraturan daerah yang berhubungan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang – undangan yang tingkatnya lebih tinggi.

2.1.1 Tujuan Pengawasan

Menurut Manullang, (2001 : 172), Tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan pada pimpinan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Tujuan utama pengawasan untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.

2.1.2 Teknik Pengawasan

Menurut Siagian (2002: 72), Teknik pengawasan ada dua macam yaitu ;

1. Pengawasan Langsung yaitu apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan atau dijalankan . Pengawasan ini dapat berbentuk :
 - a. Inspeksi langsung
 - b. Laporan dari tempat
2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan dimana laporan ini berbentuk :
 - a. Secara tertulis
 - b. Secara lisan

2.1.3 Tipe Pengawasan

Tipe pengawasan berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan pengawasan tersebut. Terdapat 2 (dua) tipe pengawasan terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha, yaitu pengawasan yang bersifat rutin dan pengawasan mendadak atau sering dikenal dengan Sidak. Pengawasan rutin dilakukan secara kontinyu dengan interval waktu tertentu atau berkala (contoh : dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan), sedangkan pengawasan yang bersifat mendadak (incognito) dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan yang bersifat rutin dilakukan pada kondisi kegiatan dan/atau usaha yang sudah stabil, sedangkan Sidak dilakukan pada kegiatan dan/atau usaha yang sedang bermasalah (ada kasus lingkungan). Sidak dapat dilakukan setiap saat tergantung kebutuhan, misalnya pada jam dini hari tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung jawab usaha atau kegiatan.

Pengawasan juga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) tipe yang lain, yaitu pengawasan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sendiri (self monitoring) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya oleh pemerintah atau Lembaga Sawadaya Masyarakat. Self monitoring bersifat rutin dan dilakukan untuk memenuhi persyaratan izin atau peraturan yang ada.

Pengawasan jenis ini memerlukan kejujuran dari pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pengawasan yang dilakukan pemerintah biasanya tidak dilakukan secara rutin atau berkala dan bersifat sesaat, karena

terbatasnya dana dan tenaga. Tujuannya adalah sebagai cross check atas hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha. Dengan demikian, dapat diketahui kebenaran data self monitoring yang telah disampaikan kepada pemerintah. Pengawasan yang bersifat cross check ini lebih baik dilakukan secara mendadak tanpa memberi tahu pihak pengusaha atau penanggung jawab kegiatan.

Jadi Pengawasan yang baik dapat diartikan sebagai berikut :

1. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan.
2. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera.
3. Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan.
4. Pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar yang digunakan.
5. Pengawasan harus luwes dan fleksibel.
6. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi.
7. Pengawasan harus ekonomis.
8. Pengawasan harus mudah dimengerti.
9. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan / koreksi.

2.2. Perizinan Air Bawah Tanah

Menurut Sechan (1977:45), Secara umum dikenal tiga macam jenis sumber air yaitu :

1. Air hujan, yaitu uap air yang sudah terkondensasi dan jatuh ke bumi berupa zat cair dan zat padat (hujan es/salju).
2. Air permukaan, dapat berasal dari :
 - a. Air hujan yang mengalir di permukaan bumi dan terkumpul pada suatu tempat yang relatif rendah, seperti sungai, danau, laut dan sebagainya.
 - b. Air tanah yang mengalir keluar permukaan bumi, misalnya mata air.
 - c. Air buangan bekas aktifitas manusia.
3. Air bawah tanah merupakan air hujan atau air permukaan yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan air tanah yang disebut akifer.

Air bawah tanah atau yang biasa juga disebut air tanah terdiri dari :

1. Air Tanah Dangkal

Terjadi karena adanya daya proses peresapan air dari permukaan tanah. Lumpur akan tertahan, demikian pula dengan sebagian bakteri, sehingga air tanah akan jernih tetapi lebih banyak mengandung zat kimia (garam-garam yang terlarut) karena, melalui lapisan tanah yang mempunyai unsur-unsur kimia tertentu untuk masing-masing lapisan tanah. Lapisan tanah di sini berfungsi sebagai saringan. Disamping penyaringan, pengotoran juga masih terus berlangsung, terutama pada muka air yang dekat dengan muka tanah. Setelah menemui lapisan rapat air, air akan terkumpul yang merupakan air tanah dangkal dimana air tanah ini dimanfaatkan untuk sumber air minum melalui sumur-sumur dangkal. Air tanah dangkal terdapat pada kedalaman sekitar 15 meter (tergantung daerahnya). Sebagai sumber air minum, air tanah dangkal ditinjau dari segi kualitas agak baik, sedangkan kuantitas jumlahnya kurang dan tergantung pada musim.

2. Air Tanah Dalam

Terdapat setelah lapis rapat air yang pertama. Pengambilan air tanah dalam tak semudah air tanah dangkal. Dalam hal ini harus digunakan bor dan memasukkan pipa dengan kedalaman berkisar 20 – 300 meter hingga didapatkan suatu lapisan air.

Jika tekanan air tanah ini besar, maka air dapat menyembur keluar dan dalam keadaan tersebut sumur ini disebut dengan sumur artesis. Jika air tak dapat keluar dengan sendirinya, maka digunakan pompa untuk membantu pengeluaran air tanah dalam ini. Kualitas air tanah dalam pada umumnya lebih baik dari air tanah dangkal karena penyaringannya lebih sempurna dan umumnya bebas dari bakteri.

3. Mata Air

Mata air adalah air bawah tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Mata air yang berasal dari tanah dalam hampir tidak terpengaruh oleh musim, kuantitas dan kualitasnya sama dengan keadaan air tanah dalam.

Berdasarkan keluarnya (munculnya) air ke permukaan tanah, maka mata air terbagi atas :

1. Rembesan, dimana air keluar dari lereng-lereng.
2. Umbul, dimana air keluar ke permukaan pada suatu dataran.

Ketersediaan air bawah tanah baik jumlah maupun mutunya sangat tergantung pada kondisi lingkungan dimana air bawah tanah tersebut berada, artinya dapat berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Ketersediaan data dan

informasi tentang air bawah tanah serta data usaha / kegiatan dan industri yang memanfaatkan air bawah tanah merupakan hal yang penting untuk segera diwujudkan guna mengantisipasi kebutuhan akan air bersih demi menunjang kemajuan pembangunan di kawasan Kota Pekanbaru.

Saat ini pemanfaatan air bawah tanah meningkat dengan cepat, bahkan di beberapa tempat eksploitasinya sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Air bawah tanah biasanya diambil untuk keperluan sumber air bersih maupun untuk irigasi melalui sumur terbuka, sumur tabung, spring atau sumur horizontal. Kecenderungan memilih air bawah tanah sebagai sumber air bersih dibanding air permukaan karena memiliki keuntungan, yaitu sebagai berikut :

1. Tersedia dekat dengan tempat yang memerlukan, sehingga kebutuhan bangunan pembawa/distribusi lebih murah.
2. Debit (produksi) air tanah biasanya relatif stabil.
3. Kualitas relatif lebih bagus dari air permukaan.
4. Sifatnya *on-site*, artinya di manapun tanah digali kemungkinan besar akan didapat sumber air.
5. Praktis, tanpa mengurus administrasi (untuk rumah tangga) dan daftar tunggu.

Pengaturan pengelolaan air bawah tanah ditujukan agar pengelolaannya berlangsung efektif dan efisien tanpa menimbulkan kerusakan kondisi dan lingkungan air bawah tanah. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004

tentang Sumber Daya Air, Pasal 16 disebutkan bahwa wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya.
2. Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
3. Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya.
4. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya.
6. Mengatur, menetapkan dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
7. Membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
8. Memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya dan,

9. Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Khusus untuk Kota Pekanbaru, perizinan air bawah tanah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah. Maksud pengaturan tersebut adalah untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai akibat pengambilan air bawah tanah. Sedangkan tujuannya adalah agar keberadaan air bawah tanah sebagai sumber daya air tetap dapat mendukung perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat. Substansi peraturan daerah tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan air bawah tanah berdasarkan asas pemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian. Teknis pengelolaan air bawah tanah berlandaskan atas cekungan air bawah tanah.

Adapun urutan prioritas pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. air minum.
2. air untuk rumah tangga.
3. air untuk irigasi.
4. air untuk pertanian.
5. air untuk industri.
6. air untuk usaha pertambangan dan energi.
7. air untuk usaha perkotaan.
8. air untuk kepentingan lainnya.

Walikota Pekanbaru memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang perizinan pengelolaan air bawah tanah di wilayah Kota Pekanbaru yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Adapun wewenang dan tanggung jawab yang dimaksud meliputi :

1. Melakukan inventarisasi potensi.
2. Merencanakan pendayagunaan air bawah tanah.
3. Menetapkan peruntukan pemanfaatan air bawah tanah.
4. Melakukan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan air bawah tanah.
5. Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi air bawah tanah.
6. Mengadakan pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan air bawah tanah.

Adapun perizinan yang dikeluarkan terdiri dari :

1. Izin Eksplorasi (IE)
2. Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPAT)
3. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP)
4. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA)
5. Izin Pengambilan Mata Air (IPMA).

Pengeboran dan pengambilan air bawah tanah yang tidak memerlukan izin adalah :

1. Keperluan air minum dan rumah tangga dengan jumlah maksimum 100 M³/bulan dan tidak dipergunakan untuk tujuan komersil.

2. Keperluan peribadatan, penanggulangan kebakaran dan keperluan penelitian yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air bawah tanah dan lingkungan.
3. Keperluan pembuatan sumur imbuhan.

2.3 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Adapun indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

Menurut Siagian (2002:72-73) Teknik pengawasan ada dua macam yaitu :

1. Pengawasan Langsung yaitu apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan atau dijalankan . Pengawasan ini dapat berbentuk :
 - a. Inspeksi langsung
 - b. Laporan dari tempat
2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan dimana laporan ini berbentuk :
 - a. Secara tertulis
 - b. Secara lisan

2.4 Teknik Pengukuran

Adapun teknik pengukuran dalam hal ini ditujukan agar terdapat kesepahaman penilaian pada penelitian ini, adapun setiap indicator di nilai dengan pengukuran sebagai berikut :

1. Inspeksi Langsung

- a. Baik : Apabila Mayoritas Responden mengatakan/menjawab bahwa BLH Selalu mengadakan inspeksi langsung dalam rekapitulasi indikator inspeksi langsung.
- b. Kurang Baik : Apabila Mayoritas Responden mengatakan/menjawab bahwa BLH hanya Kadang-Kadang mengadakan inspeksi langsung dalam rekapitulasi indikator inspeksi langsung.
- c. Tidak Baik : Apabila Mayoritas Responden mengatakan/menjawab bahwa BLH Tidak Pernah Mengadakan Inspeksi langsung dalam rekapitulasi indikator inspeksi langsung.

2. Laporan Dari Tempat

- a. Baik : Apabila Mayoritas Responden mengatakan / menjawab Selalu ada laporan dari tempat dalam pengurusan izin, pada rekapitulasi indikator Laporan Dari Tempat.
- b. Kurang baik : Apabila Mayoritas Responden mengatakan / menjawab hanya Kadang-Kadang ada laporan dari tempat untuk pengurusan izin, pada rekapitulasi indikator Laporan Dari Tempat.

- c. Tidak Baik : Apabila Mayoritas Responden mengatakan / menjawab Tidak Pernah ada laporan dari tempat dalam pengurusan izin, pada rekapitulasi indikator Laporan Dari Tempat.

3. Secara Tertulis

- a. Baik : Apabila Mayoritas Responden mengatakan / menjawab Selalu ada Peringatan Secara Tertulis oleh BLH, pada rekapitulasi indikator Secara Tertulis.
- b. Kurang Baik : Apabila Mayoritas Responden mengatakan / menjawab hanya Sese kali/ Kadang-Kadang ada Peringatan tertulis dari BLH, Pada rekapitulasi indikator Secara Tertulis.
- c. Tidak Baik : Apabila Mayoritas Responden mengatakan / menjawab Tidak pernah ada Peringatan tertulis oleh BLH, Pada rekapitulasi indikator Secara Tertulis.

4. Secara Lisan

- a. Baik : Apabila Mayoritas Responden mengatakan / menjawab Selalu ada Peringatan Lisan oleh BLH, pada rekapitulasi indikator Secara Lisan.
- b. Kurang Baik : Apabila Mayoritas Responden mengatakan / menjawab hanya Sese kali/Kadang-Kadang ada Peringatan lisan dari BLH, pada rekapitulasi indikator Secara Tertulis.
- c. Tidak Baik : Apabila Mayoritas Responden mengatakan / menjawab Tidak pernah ada Peringatan lisan oleh BLH, pada rekapitulasi indikator Secara Lisan.

2.5 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, penulis mengambil hipotesa yaitu:

“ Diduga Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Tawah Tanah Di Kota Pekanbaru Belum Optimal ”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (*holistic*), dibentuk oleh kata-kata dan diperoleh dari situasi yang alamiah.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini dilaksanakan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru pada bulan Juli tahun 2011 hingga selesai.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah Badan Usaha yang diwajibkan untuk mengurus izin pengeboran air bawah tanah pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru di dalam penelitian ini peneliti melakukan batasan masalah yaitu, pada Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan. Menurut Sugiono (2003:90), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan, karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Badan Usaha yang mengurus perizinan pengeboran air bawah tanah dalam hal ini badan usaha Penginapan dan Perhotelan di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 105 Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan dan, pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, jumlah populasi pegawai pada Badan lingkungan Hidup Kota Pekanbaru yang dijadikan populasi yaitu berjumlah 33 orang pegawai.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara tertentu. Dari penjelasan ini maka penelitian akan berhadapan dengan populasi yang bersifat heterogen dan jumlah cukup besar. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi secara keseluruhan yang akan dijadikan responden dalam suatu penelitian. Adapun sampel untuk Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan di Kota Pekanbaru diambil dengan menggunakan Teori Slovin dan jumlah sampel diketahui :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad \longrightarrow \quad \text{Tekhnik Slovin}$$

Keterangan :

n : Sampel

N : Populasi

e^2 : Tingkat kesalahan

Adapun populasi dari tabel diatas dapat dilihat sebesar 105 Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan. Adapun jumlah sampel yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{105}{1 + 105(10\%)^2}$$

$$n = \frac{105}{1 + 105 (0,01)}$$

$$n = \frac{105}{1 + 1,05}$$

$$n = \frac{105}{2,05}$$

$$n = 51,21 = 51 \text{ Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan (digenapkan jumlahnya).}$$

Jadi, adapun sampelnya adalah berjumlah sebanyak 51 Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan yang ada di Kota Pekanbaru dan ditambahkan dengan jumlah pegawai yang bekerja di Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru di ambil sebanyak 7 orang dengan menggunakan Purposive Sampling.

Mustafa (2000:46), Purposive Sampling adalah, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Jadi jumlah keseluruhan responden

adalah 58 Sampel. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan pengambilan sampel dalam penelitian ini dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 : Penentuan Jumlah Populasi dan Sample

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Badan Lingkungan Hidup	1	1	1,09
2	Sekretaris	1	1	1,09
3	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dan Amdal	1	1	1,09
4	Sub Bidang Konservasi Dan Tata Lingkungan	1	1	1,09
5	Sub bidang Amdal	1	1	1,09
5	Pegawai Bidang Tata Lingkungan Dan Amdal	2	2	3,44
6	Badan UsahaPenginapan Dan Perhotelan Di Kota Pekanbaru	105	51	91,20
	Jumlah	112	58	100 %

Sumber : Data Olahan 2011.

3.4 Jenis Data

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono,2006:129). Contohnya melalui Kuosioner berupa pertanyaan dan wawancara.
2. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono,2006:129). Misalnya dari literature atau informasi dari instansi yang terkait dalam penelitian.

Pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian serta untuk memperoleh informasi yang akurat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap obyek yang teliti.
2. Angket yaitu upaya pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan beserta *alternative* jawabannya kemudian disebarkan kepada responden.
3. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden.

3.6 Analisa Data

Setelah seluruh data terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan dan ditabulasi menurut jenis data dan serta ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian dan kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1. Letak Geografis

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Propinsi Riau, memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri, pusat pelayanan jasa dan pusat pelayanan lainnya. Hal tersebut didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana perhubungan darat, udara dan sungai. Terletak antara 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' – 0° 45' Lintang Utara. Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah :

1. Sebelah utara : Kab. Siak & Kab. Kampar.
2. Sebelah selatan : Kab. Kampar & Kab. Pelalawan.
3. Sebelah timur : Kab. Siak & Kab. Pelalawan.
4. Sebelah barat : Kab. Kampar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987, tanggal 7 September 1987, Kota Pekanbaru memiliki luas 632,26 Km² yang terdiri dari delapan kecamatan. Kemudian dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 jumlah kecamatan dimekarkan menjadi 12.

Posisi strategis Kota Pekanbaru yang terletak di jalur lintas timur Pulau Sumatera dan mudah dilalui oleh arus lalu lintas dari ujung utara sampai ujung selatan Pulau Sumatera memberikan berbagai pengaruh serta peluang bagi perkembangan perekonomian. Letak Kota Pekanbaru secara geografis

sangat strategis yang terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera dan merupakan dataran yang mudah untuk dikembangkan.

4.2. Klimatologi Dan Hidrologi

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 31,6 °C – 33,7 °C dan suhu minimum antara 22,1 °C – 23,3 °C. Curah hujan rata-rata adalah 2.552 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar : musim hujan jatuh pada bulan September sampai dengan Februari dan musim kemarau jatuh pada bulan Maret sampai dengan Agustus. Kelembaban maksimum antara 94 % - 96 % dan kelembaban minimum antara 59 % - 69 %.

Kondisi hidrologi terdiri dari kondisi hidrologi air permukaan dan air bawah tanah. Hidrologi air permukaan pada umumnya berasal dari sungai-sungai, terutama Sungai Siak. Hidrologi air bawah tanah dalam berasal dari Formasi Petani, dimana sifat air bawah tanahnya kurang baik sebagai air minum. Sedangkan hidrologi air bawah tanah dangkal berasal dari Formasi Minas. Batuan Formasi Minas memiliki kelulusan dan porositas yang tinggi, sehingga Kota Pekanbaru memiliki potensi ketersediaan air bawah tanah dangkal yang cukup banyak.

4.3. Sejarah Singkat Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak adanya restrukturisasi kelembagaan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk juga pada Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru, sesuai dengan visi dan misi kota Pekanbaru, dimana Kota Pekanbaru diarahkan menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan dan pusat budaya melayu yang memberikan konsekwensi terjadinya degradasi lingkungan hidup di Kota Pekanbaru. Perubahan tata guna lahan dan peningkatan pencemaran dan polusi menjadikan permasalahan lingkungan hidup semakin kompleks di kota Pekanbaru. Penanganan permasalahan lingkungan hidup tersebut harus dilakukan dengan lebih serius dimana dibutuhkan kewenangan kelembagaan yang lebih besar dan didukung oleh aparaturnya yang mempunyai kompetensi yang lebih tinggi.

Sebelum keluar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.8 Tahun 2001 tentang struktur organisasi, bahwa permasalahan/bidang Lingkungan Hidup ditangani oleh bagian Lingkungan Hidup pada Sekretariat daerah kota Pekanbaru yang dipimpin oleh Kepala Bagian dengan segala keterbatasan dan wewenang yang dimilikinya. Maka agar bisa menangani permasalahan struktur organisasi bagian Lingkungan hidup pada Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru diubah menjadi sebuah badan yang disebut Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Pekanbaru dengan kewenangan yang lebih besar.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan, Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan langsung bertanggung jawab kepada Walikota .

Institusi Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru adalah instansi yang bertanggung jawab terhadap aspek lingkungan secara global maupun secara khusus untuk Melaksanakan Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Wilayah Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.9 Tahun 2008, sehingga dapat dinyatakan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok yaitu : Melaksanakan Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Wilayah Kota Pekanbaru .

Sebagai institusi yang relative baru dalam pelayanannya maasih banyak permasalahan, ada permasalahan yang dapat diselesaikan secara tuntas oleh pejabat sebelumnya dan ada beberapa permasalahan yang masih belum sempat terselesaikan dengan baik. Namun dengan demikian dengan adanya dukungan yang baik dari seluruh jajaran personil, berbagai permasalahan dimaksud secara beransur-ansur dapat diselesaikan dengan baik pula.

Sejalan dengan peranan Badan Lingkungan Hidup Kota dalam memfasilitasi dibidang Pelaksanakan Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Wilayah Kota Pekanbaru, maka peranan tenaga teknis lingkungan sangatlah penting. Dimana dalam Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keberhasilan Program Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru selain didukung oleh seluruh jajaran dibawah, juga tidak terlepas dari dukungan

masyarakat lintas sektoral. Oleh karena itu koordinasi yang telah berjalan dengan baik ini hendaknya kedepan terus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Adapun Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugasnya yaitu :

Visi : PEKANBARU SEBAGAI KOTA TERDEPAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN SEHAT DAN BEBAS DARI PENCEMARAN DALAM KOTA PEKANBARU TAHUN 2020.

Misi :

1. Meningkatkan penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat dan komunikasi lingkungan.
2. Meningkatkan penataan lingkungan, konservasi sumber daya alam dan, pengkajian dampak lingkungan.
3. Mengontimalkan pemantauan ,pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan.
4. Mengoptimalkan pengendalian pencemaran lingkungan.

4.4. Kedudukan Organisasi

Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam pelaksanaanya mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota dalam Bidang Lingkungan Hidup.

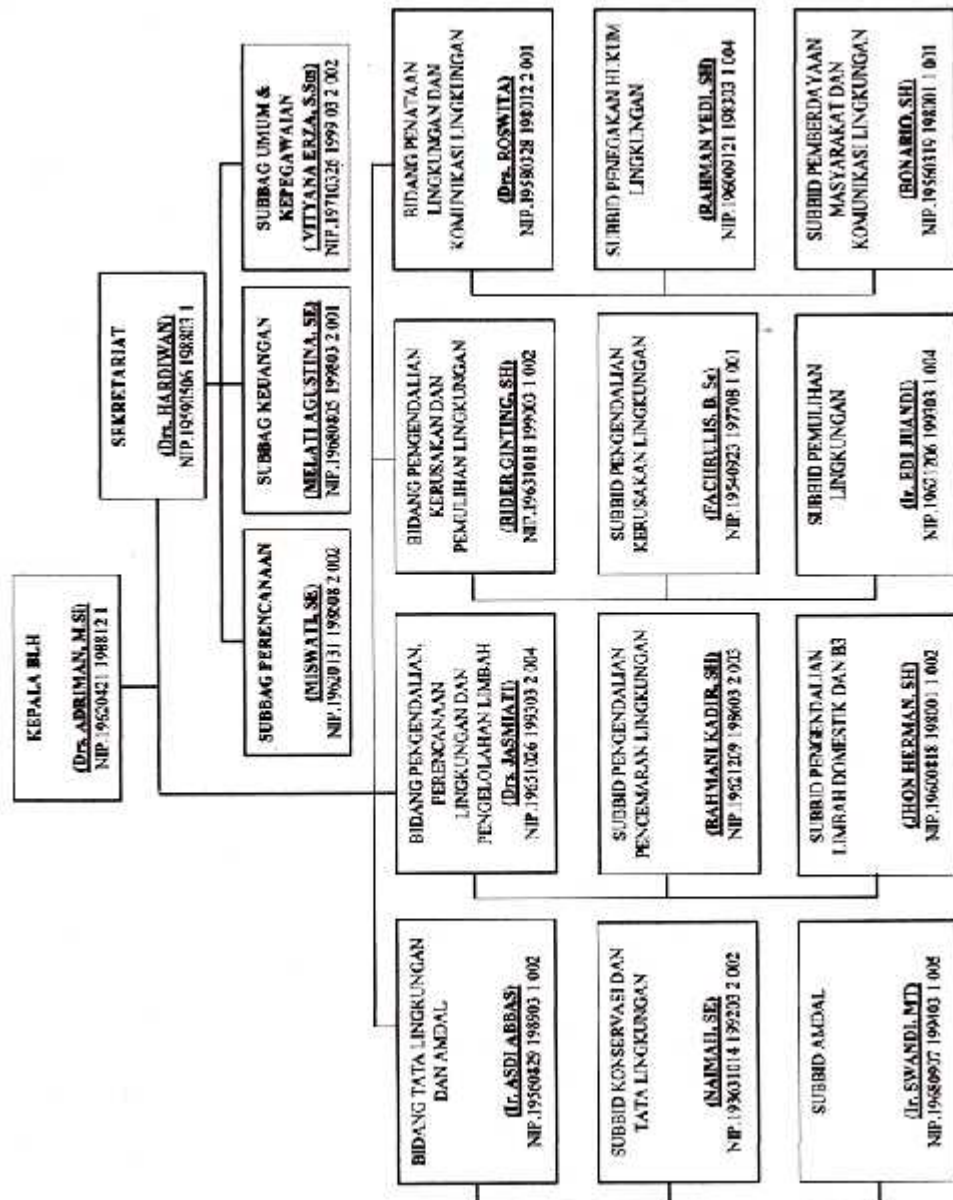
2. Fungsi Organisasi

- a. Merumuskan kebijaksanaan pemerintah kota pekanbaru dibidang tata lingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah ,pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan serta bidang penataan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan komunikasi lingkungan.
- b. Mengkoordinasikan memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijaksanaan serta kegiatan dibidang tata lingkungan dan amdal,pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah ,pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan serta bidang penataan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan komunikasi lingkungan.
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program dibidang tata lingkungan dan amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan serta bidang penataan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan komunikasi lingkungan.
- d. Memberikan pelayanan umum dan teknis dibidang tata lingkungan dan amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah ,pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan serta bidang penataan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan komunikasi lingkungan.

- e. Melaksanakan pelatihan dibidang tata lingkungan dan amdal ,pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah , pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan serta bidang penataan lingkungan,pemberdayaan masyarakat dan komunikasi lingkungan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota Pekanbaru.

4.4.1 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Badan lingkungan Hidup Kota Pekanbaru terdiri dari :

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru

Mempunyai rincian tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan otonomi daerah , desentralisasi, dekonsentrasi dan, tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup .
- b. Merumuskan kebijaksanaan pemerintah kota pekanbaru dibidang tata lingkungan dan Amdal, pengendalian dan pemulihan lingkungan serta penataan lingkungan .
- c. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan, menyerasikan kebijaksanaan serta kegiatan dibidang tata lingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengolahan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan dan, bidang penataan lingkungan dan, komunikasi lingkungan.
- d. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program dibidang tata lingkungan dan, Amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan, pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, dan bidang penataan lingkungan dan, komunikasi lingkungan.
- e. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang tata lingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan, pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan, pemulihan lingkungan, dan bidang penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan.

- f. Melaksanakan pelatihan dibidang tata lingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan dan, bidang penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota Pekanbaru.

Mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinisasian tugas bidang lingkungan hidup.
- b. Perumusan kebijakan.
- c. Menyusun rencana kerja.
- d. Pemberian pelayanan umum dan teknis.
- e. Pelaksanaan pelatihan.
- f. Pengendalian, pembinaan dan, bimbingan.
- g. Pemantauan dan, evaluasi.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

2. Sekretaris

Mempunyai rincian tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan dan, pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program.
- b. Memimpin menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan, penyusun program badan.
- c. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.

- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan dilingkungan badan perencanaan pembangunan daerah.
- e. Mewakili kepala badan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat.
- f. Mengkoordinasikan dan, mengarahkan kegiatan sub bagian – sub bagian.
- g. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan, merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga dilingkungan badan.
- h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- i. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban badan.
- j. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- k. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara diposis atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- l. Mengevaluasi tugas secretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas secretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis.

- n. Memfasilitasi dan asistensi tugas secretariat dengan cara konsultasi , kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja badan.
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi badan.
- d. Pengkoordinasian rapat dinas dan keprotokolan.
- e. Pengkoordinasian laporan tahunan.
- f. Pengkoordinasian kebersihan, keindahan, dan ketertiban kantor.
- g. Pengevaluasian tugas.
- h. Fasilitas dan asistensi.
- i. Pengevaluasian dan pelaporan.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Pada Kesekretariatan dibantu oleh beberapa sub bagian yang terdiri dari ;

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Penyusunan Program.

3. Bidang Tata Lingkungan Dan Amdal

Mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan kebijakan bidang tata lingkungan dan Amdal

- b. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan membuat laporan tentang masalah atau kegiatan sesuai dengan bidang tata lingkungan dan Amdal.
- c. Melaksanakan hubungan kerja dibidang teknis dengan instansi terkait dikota Pekanbaru dan lembaga lain yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- e. Mengevaluasi tugas bidang tata lingkungan dan Amdal berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang tata lingkungan dan Amdal kepada atasan secara lisan maupun tertulis.
- g. Menfasilitasi dan asistensi tugas bidang tata lingkungan dan Amdal dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan.
- b. Pemantauan dan evaluasi.
- c. Pelaksanaan koordinasi teknis.

- d. Pengevaluasian tugas.
- e. Fasilitasi dan asistensi.
- f. Pengevaluasian dan pelaporan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Pada Bidang Tata Lingkungan Dan Amdal dalam pelaksanaan tugasnya membawahi beberapa dan Sub Bidang, adapun Sub Bidang tersebut adalah :

1. Sub Bidang Konserfasi Dan Tata lingkungan

Mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan kebijakan dan mengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang Konserfasi Dan Tata lingkungan.
- b. Melaksanakan pengendalian, pemantauan dan pengawasan, penataan, analisis dan evaluasi serta pelaporan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan.
- c. Melakukan koordinasi pengendalian pencemaran dengan instansi terkait.
- d. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengendalian pencemaran air, udara , limbah kegiatan domestik dan limbah B3.
- e. Mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan kebijaksanaan dengan upaya pencegahan, penindakan lingkungan yang tercemar akibat aktifitas manusia.
- f. Merumuskan dan melaksanakan pemantauan kelapangan berdasarkan laporan yang masuk untuk mengetahui pencemaran.

- g. Merumuskan dan melaksanakan serta menyusun laporan perkembangan daerah yang tercemar dengan mempedomani data masuk.
- h. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- i. Mengevaluasi tugas sub bidang konserfasi dan tata lingkungan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bidang konservasi dan tata lingkungan kepada atasan secara lisan maupun tertulis.
- k. Memfasilitasi dan asistensi tugas sub bidang konserfasi dan tata lingkungan dengan cara konsultasi ,kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan koordinasi bidang konservasi dan tata lingkungan.
- b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.
- c. Pengkoordinasian tugas dengan instansi terkait.
- d. Perumusan kebijakan teknis.
- e. Pengevaluasian tugas.

- f. Fasilitasi dan asistensi.
- g. Pengevaluasian dan pelaporan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

2. Sub Bidang Amdal

Mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang Amdal.
- b. Merumuskan kebijakan dan pengembangan pedoman analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) dan audit lingkungan hidup ,kebijakan perencanaan lingkungan serta menyusun materi keputusan Walikota Pekanbaru tentang surat keputusan kelayakan lingkungan.
- c. Memberikan konsultasi/bimbingan Amdal, UKL-UPL dan audit lingkungan hidup.
- d. Pengkajian, pengembangan metodologi, sistem dan tata laksana Amdal , UKL-UPL dan audit lingkungan hidup, pengkajian perencanaan lingkungan dan evaluasi perubahan fungsi ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, penyusunan masukan untuk perencanaan wilayah serta penyelenggaraan kesekretariatan komisi penilai Amdal.

- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan Amdal, UKL-UPL dan audit lingkungan hidup dan kebijakan perencanaan lingkungan.
- f. Pelaksanaan tugas lain dibidang tata lingkungan dan Amdal yang diberikan oleh pimpinan.
- g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- h. Mengevaluasi tugas sub bidang Amdal berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bidang Amdal kepada atasan secara lisan maupun tertulis.
- j. Memfasilitasi dan asistensi tugas sub bidang Amdal dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang Amdal.
- b. Pemberian konsultasi/bimbingan.
- c. Pengkajian bidang Amdal.
- d. Pemantauan dan evaluasi.
- e. Pengevaluasian tugas.
- f. Fasilitas dan asistensi.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan Pengelolaan Limbah.

Mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah.
- b. Melaksanakan pengendalian, pemantauan dan pengawasan penataan, analisis dan evaluasi serta pelaporan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan.
- c. Melakukan koordinasi pengendalian pencemaran dengan instansi terkait.
- d. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengendalian pencemaran air, udara, limbah kegiatan domestic dan limbah B3.
- e. Mengkoordinasikan, menyelaraskan memandukan kebijaksanaan dengan upaya pencegahan, penindakan lingkungan yang tercemar akibat aktifitas manusia.
- f. Merumuskan dan melaksanakan pemantauan kelapangan berdasarkan laporan yang masuk untuk mengetahui pencemaran.
- g. Merumuskan dan melaksanakan serta menyusun laporan perkembangan daerah yang tercemar dengan mempedomani data masuk.
- h. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.

- i. Mengevaluasi tugas bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah kepada atasan secara lisan maupun tertulis.
- k. Memfasilitasi dan asistensi tugas bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah dengan cara konsultasi ,kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan.
- b. Pengendalian pencemaran lingkungan.
- c. Pengkoordinasian dengan instansi terkait.
- d. Perumusan pemantauan lapangan.
- e. Pengevaluasian tugas.
- f. Fasilitasi dan asistensi.
- g. Pengevaluasian dan pelaporan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Pada Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan Pengelolaan

Limbah dibantu oleh beberapa Sub Bidang yang terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- b. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestic Dan B3.
- 5. Bidang Pengendalian Kerusakan Dan Pemulihan Lingkungan.

Mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan kebijakan bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan.
- b. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan upaya pencegahan penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan serta pemulihan lingkungan yang rusak akibat perbuatan manusia dan alam.
- c. Mengkoordinasikan penyediaan dukungan dan bantuan serta kerja sama dalam rangka pengendalian dan pemulihan lingkungan.
- d. Merumuskan kebijaksanaan teknis dalam rangka pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan.
- e. Melakukan bimbingan teknis kelapangan dalam tugas serta memulihkan kerusakan lingkungan.
- f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- g. Mengevaluasi tugas bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan berdasarkan informasi ,data ,laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan kepada atasan secara lisan maupun tertulis.

- i. Memfasilitasi dan asistensi tugas bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kegiatan.
- b. Pengkoordinasian dukungan pengendalian lingkungan.
- c. Perumusan kebijakan teknis.
- d. Pemulihan kerusakan lingkungan.
- e. Pengevaluasian tugas.
- f. Fasilitasi danb asistensi.
- g. Pengevaluasian dan pelaporan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Pada Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dan Pemulihan Lingkungan dibantu oleh beberapa Sub Bidang yang terdiri dari ;

- a. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
 - b. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.
6. Bidang Penataan lingkungan Dan Komunikasi Lingkungan.

Mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan kebijakan dibidang Penataan Lingkungan Dan Komunikasi Lingkungan.

- b. Mengkordinasikan pelaksanaan kebijakan dibidang Penataan Lingkungan Dan Komunikasi Lingkungan.
- c. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan masalah dan kegiatan dibidang Penataan Lingkungan Dan Komunikasi Lingkungan.
- d. Melaksanakan koordinasi teknis dengan instansi terkait di kota Pekanbaru dan lembaga lain yang terkait.
- e. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- f. Mengevaluasi tugas Penataan Lingkungan Dan Komunikasi Lingkungan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas Penataan Lingkungan Dan Komunikasi Lingkungan kepada tasan secara lisan maupun tertulis.
- h. Memfasilitasi dan asistensi tugas bidang Penataan Lingkungan Dan Komunikasi Lingkungan dengan cara konsultasi dan kunjungan kerja sosialisasi dan bimbingan teknis.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan.
- b. Pengkoordinasian kebijakan.

- c. Pemantauan dan evaluasi.
- d. Pelaksanaan koordinasi teknis.
- e. Pengevaluasian tugas.
- f. Fasilitasi dan asistensi.
- g. Pengevaluasian dan pelaporan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Pada Bidang Penataan Lingkungan Dan Komunikasi Lingkungan dibantu oleh beberapa Sub Bidang yang terdiri dari ;

- a. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
- b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi lingkungan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel : 5.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki – laki	44	76
2	Perempuan	14	24
Jumlah		58	100 %

Sumber: Data Olahan 2011

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden laki-laki adalah responden terbanyak yang berjumlah 44 orang atau 76%, sedangkan responden perempuan hanya 14 orang atau 24%. Adapun jumlah responden berdasarkan jenis kelamin mempunyai tingkat umur yang berbeda-beda dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Umur (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
1	25-35	12	21
2	36-45	25	43
3	46-55	21	36
Jumlah		58	100 %

Sumber: Data Olahan 2011

Dari tabel diatas dapat dilihat bawah dari 58 responden, mayoritas responden memiliki tingkat umur antara 36 sampai 45 tahun dengan jumlah responden sebanyak 25 orang atau 43% responden. Selanjutnya di susul dengan responden yang memiliki tingkat umur antara 46 sampai 55 Tahun dengan jumlah sebanyak 21 orang atau 36% dari keseluruhan responden. Sedangkan yang paling

sedikit yaitu tingkat umur dari 25 sampai 35 tahun yaitu berjumlah 12 orang atau 21% dari keseluruhan responden. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pendidikan responden, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 5.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SMA/SMK	20	34
2	Sarjana (S1)	26	45
3	Pasca Sarjana (S2)	12	21
Jumlah		58	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2011

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S1) dengan jumlah 26 orang atau 45% dari keseluruhan jumlah responden. Selanjutnya disusul oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA / SMK yang berjumlah 20 orang atau 34% responden. Dan yang paling sedikit adalah responden yang memiliki tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2) yang berjumlah 12 orang tau sekitar 21% dari total keseluruhan responden.

5.2 Pengawasan Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Pada Badan Usaha Perhotelan Dan Penginapan Di Kota Pekanbaru.

Khusus untuk Kota Pekanbaru, perizinan air bawah tanah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah. Maksud pengaturan tersebut adalah untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai akibat pengambilan air bawah tanah. Sedangkan tujuannya adalah agar keberadaan air bawah tanah sebagai

sumber daya air tetap dapat mendukung perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat.

Substansi peraturan daerah tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan air bawah tanah berdasarkan asas pemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian. Teknis pengelolaan air bawah tanah berlandaskan atas cekungan air bawah tanah.

Adapun urutan prioritas pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. air minum.
2. air untuk rumah tangga.
3. air untuk irigasi.
4. air untuk pertanian.
5. air untuk industri.
6. air untuk usaha pertambangan dan energi.
7. air untuk usaha perkotaan.
8. air untuk kepentingan lainnya.

Walikota Pekanbaru memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang perizinan pengelolaan air bawah tanah di wilayah Kota Pekanbaru yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Adapun wewenang dan tanggung jawab yang dimaksud meliputi :

1. Melakukan inventarisasi potensi.
2. Merencanakan pendayagunaan air bawah tanah.
3. Menetapkan peruntukan pemanfaatan air bawah tanah.

4. Melakukan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan air bawah tanah.
5. Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi air bawah tanah.
6. Mengadakan pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan air bawah tanah.

Adapun perizinan yang dikeluarkan terdiri dari :

1. Izin Eksplorasi (IE).
2. Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPAT).
3. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP).
4. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA).
5. Izin Pengambilan Mata Air (IPMA).

Pengeboran dan pengambilan air bawah tanah yang tidak memerlukan izin adalah :

1. Keperluan air minum dan rumah tangga dengan jumlah maksimum 100 M³/bulan dan tidak dipergunakan untuk tujuan komersil.
2. Keperluan peribadatan, penanggulangan kebakaran dan keperluan penelitian yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air bawah tanah dan lingkungan.
3. Keperluan pembuatan sumur imbuhan.

Tentunya dalam memberikan perizinan terhadap pengeboran air bawah tanah oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru perlu adanya Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengeboran Air bawah Tanah pada Badan Usaha yang ada di kota Pekanbaru khususnya dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan.

5.2.1 Hasil Tinjauan Lapangan / Observasi

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru merupakan suatu instansi yang diberikan wewenang untuk melaksanakan fungsinya dalam mengatur dan mengawasi jalannya kelestarian lingkungan khususnya kota Pekanbaru, dimana selain pelaksanaan fungsinya sebagai pengatur dan pengawas kelestarian lingkungan kota, BLH juga memiliki wewenang dalam mengeluarkan berbagai perizinan salah satunya adalah Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah.

Dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengawasi pelaksanaan pengeboran air bawah tanah yang dilakukan oleh badan usaha, dimana dalam penelitian ini badan usaha yang dimaksud adalah badan usaha penginapan dan perhotelan Kota Pekanbaru, pihak BLH memiliki 2 (dua) wewenang yaitu melakukan pengawasan langsung dan melakukan pengawasan tidak langsung, dengan masing masing wewenang tersebut masing-masing dipecah menjadi 2 kegiatan, yaitu *pertama*, mengadakan inspeksi langsung ke lapangan, *kedua*, mendapatkan laporan dari tempat, dimana kedua kegiatan ini termasuk dalam pengawasan langsung. Sedangkan untuk pengawasan tidak langsung juga dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu *pertama*, secara tertulis hal ini dapat berupa surat peringatan dan surat-surat lainnya. *Kedua*, Secara lisan dimana BLH melakukan berbagai tindakan untuk mengajak dan mensosialisasikan masalah perizinan pengeboran air bawah tanah kepada pihak badan usaha khususnya Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan di Kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan berbagai informasi, dimana dari informasi-informasi tersebut dapat menjadi landasan untuk menilai optimal atau tidaknya pelaksanaan pengawasan BLH terhadap perizinan pengeboran air bawah tanah. Dari fakta-fakta yang peneliti dapatkan dilapangan, peneliti menilai bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BLH terhadap perizinan pengeboran air bawah tanah oleh Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan di Kota Pekanbaru masih dalam kategori kurang optimal atau kurang baik, hal ini ditandai dengan Kurangnya sosialisasi mengenai perizinan pengeboran air bahwa serta Tidak ada tindakan tegas kepada badan usaha yang tidak mengurus perizinan.

5.2.2 Tanggapan Responden

Adapun Indikator untuk mengetahui tingkat pengawasan dari Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung dalam hal ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundangan dibidang air bawah tanah yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru yang langsung turun kelapangan untuk melihat dan mengawasi jalannya kegiatan pengeboran sedang dilaksanakan. Dalam pengawasan langsung ini terbagi menjadi dua indikator yaitu, Inspeksi Langsung dan Laporan dari Tempat.

a. Impeksi Langsung

Impeksi Langsung yang dimaksudkan dalam hal ini meliputi, pemeriksaan dengan seksama secara langsung yang dilakukan oleh BLH kepada Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap Impeksi langsung yang dilakukan oleh BLH kepada Badan Usaha Perhotelan dan penginapan dapat kita lihat pada table berikut ini :

Tabel: 5.4
Tanggapan Responden Mengenai Impeksi/Tinjauan Langsung BLH Terhadap Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	18	31
2	Kadang-Kadang	15	26
3	Tidak Pernah	25	43
Jumlah		58	100 (%)

Sumber : Data Olahan Tahun 2011.

Dari tabel diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai Impeksi Langsung yang dilakukan oleh BLH terhadap Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah dengan jumlah 25 orang atau 43 % dari keseluruhan responden, selanjutnya diikuti 18 orang atau 31 % responden mengatakan Selalu dan paling sedikit yaitu responden yang mengatakan Kadang-Kadang berjumlah 15 orang atau 26 %. Selanjutnya untuk mengetahui Tanggapan Responden mengenai Kelengkapan Surat Tugas BLH dalam melakukan Impeksi langsung dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel: 5.5
Tanggapan Responden Mengenai Kelengkapan Surat Tugas BLH Dalam Melakukan Inpeksi Langsung

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	16	28
2	Kadang-Kadang	17	29
3	Tidak Pernah	25	43
Jumlah		58	100 (%)

Sumber : Data Olahan 2011.

Table diatas menunjukkan bahwa Mayoritas responden mengatakan bahwa BLH tidak memiliki kelengkapan surat tugas dalam pelaksanaan dalam melakukan inpeksi langsung yaitu sebanyak 25 orang atau 43 % dari jumlah keseluruhan responden, selanjutnya diikuti dengan tanggaan responden yang mengatakan Kadang-Kadang yaitu sebanyak 17 orang atau 29 % dan yang paling sediki responden mengatakan Selalu yaitu sebnyak 16 orang atau 28 % dari keseluruhan responden. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Kelengkapan Persyaratan / Dokumen Dan Fasilitas Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel: 5.6
Tanggapan Responden Mengenai Kelengkapan Persyaratan/Dokumen Dan Fasilitas Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	19	33
2	Kadang-Kadang	28	48
3	Tidak Pernah	11	19
Jumlah		58	100 (%)

Sumber : Data Olahan 2011.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari segi Kelengkapan Dokumen / Persyaratan Dalam Permohonan Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah mayoritas responden mengatakan Kadang-Kadang yang berjumlah 28 orang atau 48 % dari keseluruhan jumlah responden, selanjutnya diikuti dengan responden

yang mengatakan Selalu yaitu sebanyak 19 orang atau 33 %, dan paling sedikit responden yang mengatakan Tidak Pernah yaitu sebanyak 11 orang atau 19 %. Kemudian untuk melihat tanggapan responden mengenai ketepatan waktu dalam inpeksi langsung yang dilakukan oleh BLH terhadap pelaksanaan pengeboran air bawah tanah dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel: 5.7
Tanggapan Responden Mengenai Ketepatan Waktu Inspeksi Langsung Oleh BLH Terhadap Pelaksanaan Pengeboran Air Bawah Tanah.

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	17	29
2	Kadang-Kadang	22	38
3	Tidak Pernah	19	33
Jumlah		58	100 (%)

Sumber: Data Olahan 2011.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas responden mengatakan dalam hal ketepatan waktu inspeksi langsung yang dilakukan oleh BLH adalah Kadang-Kadang yaitu sebanyak 22 orang atau 38 % dari keseluruhan jumlah responden selanjutnya diikuti dengan jawaban responden yang mengatakan Tidak Pernah yaitu sebanyak 19 orang atau 33 % . Sedangkan yang paling sedikit responden mengatakan Selalu yaitu sebanyak 17 orang arau 29 % dari keseluruhan responden. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap kendala yang terjadi saat pelaksanaan inpeksi langsung oleh BLH dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 5.8
Tanggapan Responden Mengenai Kendala Dalam Pelaksanaan Inspeksi Langsung

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	25	43
2	Kadang-Kadang	22	38
3	Tidak Pernah	11	19
Jumlah		58	100 (%)

Sumber: Data Olahan 2011.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas responden mengatakan Selalu ada kendala dalam pelaksanaan inspeksi langsung yang dilakukan oleh BLH yaitu sebanyak 25 orang atau 43 % dari keseluruhan responden. Selanjutnya disusul dengan jawaban responden yang mengatakan Kadang-Kadang yaitu sebanyak 22 orang atau 38 %. Sedangkan yang paling sedikit yaitu responden yang menjawab Tidak Pernah yaitu sebanyak 11 orang atau 19 % dari jumlah keseluruhan responden. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Pelanggaran Terhadap Ketentuan Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel : 5.9
Tanggapan Responden Mengenai Pelanggaran Terhadap Ketentuan Perizinan

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	9	15
2	Kadang-Kadang	22	38
3	Tidak Pernah	27	47
Jumlah		58	100 (%)

Sumber : Data Olahan 2011.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa, dalam hal pelanggaran Ketentuan Perizinan Pengeboran Air Bawah tanah mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah yaitu sebanyak 27 orang atau sekitar 47 % dari jumlah keseluruhan responden. Seterusnya diikuti oleh tanggapan responden yang menjawab Kadang-Kadang yaitu sebanyak 22 orang atau 38 %. Sedangkan yang paling sedikit adalah

responden yang mengatakan Selalu yaitu sebanyak 9 orang atau sekitar 15 % dari keseluruhan responden. Selanjutnya untuk mengetahui Rekapitulasi dari masing-masing pertanyaan dari indikator Impeksi Langsung dapat kita lihat dari tabel berikut ini :

Tabel 5.10
Rekapitulasi Tanggapan Responden Dilihat Dari Indikator Impeksi Langsung

No	Soal	Kategori Jawaban			Jumlah responden
		Selalu	Kadang-Kadang	Tidak Pernah	
1	1	18	15	25	58
2	2	16	17	25	58
3	3	19	28	11	58
4	4	17	22	19	58
5	5	25	22	11	58
6	6	9	22	27	58
Jumlah Rata-Rata		17	22	19	58
Persentase (%)		29%	38%	33%	100%

Sumber : Data Olahan 2011.

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat kita lihat dari masing-masing pertanyaan yang telah peneliti berikan kepada responden untuk mengetahui tanggapan responden terhadap Pengawasan BLH dalam hal Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah dari indikator Inspeksi Langsung, mayoritas responden mengatakan Kadang-Kadang yaitu sebanyak 22 orang atau sekitar 38 % dari keseluruhan jumlah responden. Selanjutnya diikuti oleh responden yang menjawab Tidak Pernah yaitu sebanyak 19 orang atau sekitar 33 % . Sedangkan yang paling sedikit responden menjawab Selalu yaitu 17 orang atau sekitar 29 %.

Dari data-data diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dinilai Kurang Baik karena Badan Lingkungan Hidup Hanya Kadang-Kadang atau hanya sesekali melakukan

pengawasan terhadap perizinan pengeboran air bawah tanah khususnya pada badan usaha Penginapan dan Perhotelan Kota Pekanbaru. Selain itu dari hasil penelitian dilapangan, kendala yang sering terjadi dalam inspeksi langsung yaitu, waktu pengawasan yang sering di undur pihak BLH, kemudian kurangnya jumlah pegawai dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga sering terjadi kesulitan dalam peninjauan langsung di lokasi pengeboran Air Bawah Tanah Tersebut. Selanjutnya permasalahan yang terjadi di lapangan adalah Kurangnya Dokumen dan Fasilitas / persyaratan dari Badan Usaha dalam mengurus perizinan, selain itu juga pemegang izin cenderung terlambat atau tidak memperpanjang surat izinnya.

b. Laporan Dari Tempat

Laporan dari tempat yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Pelaporan dari Badan usaha Penginapan dan Perhotelan untuk mengajukan Permohonan Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, yang meliputi kesadaran dari Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan dalam pengajuan surat permohonan izin pengeboran air bawah tanah di kota pekanbaru, kemudian sejauh mana pengetahuan badan usaha terhadap Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah, dan lain-lain. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pengetahuan mereka terhadap Perda Kota Pekanbaru No 4 tahun 2004 tentang pengelolaan air bawah tanah dapat kita lihat pada table berikut ini :

Tabel 5.11
Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan Terhadap Perda
Kota Pekanbaru No 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	19	33
2	Kadang-Kadang	18	31
3	Tidak Pernah	21	36
Jumlah		58	100 (%)

Sumber : Data Olahan 2011.

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden mengenai Pengetahuan mereka terhadap Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2004 Tentang Pengeboran Air Bawah Tanah mayoritas mereka mengatakan Tidak Pernah yaitu berjumlah 21 Orang atau sekitar 36 % dari keseluruhan jumlah responden, seterusnya diikuti oleh jawaban responden yang mengatakan Selalu yaitu sebanyak 19 orang atau 33 % responden, dan yang paling sedikit adalah responden yang mengatakan Kadang-Kadang yaitu sebanyak 18 orang atau 31 % dari keseluruhan jumlah responden. Kemudian untuk mengetahui tanggapan Responden mengenai Pelaporan Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.12
Tanggapan Responden Mengenai Pelaporan Badan Usaha
Penginapan Dan Perhotelan Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	16	28
2	Kadang-Kadang	17	29
3	Tidak Pernah	25	43
Jumlah		58	100 (%)

Sumber : Data Olahan 2011.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa, dalam hal Pelaporan Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah yaitu sebanyak 25 orang atau

sekitar 43 % dari jumlah keseluruhan responden. Seterusnya diikuti oleh tanggapan responden yang menjawab Kadang-Kadang yaitu sebanyak 17 orang atau 29 %. Sedangkan yang paling sedikit adalah responden yang mengatakan Selalu yaitu sebanyak 16 orang atau sekitar 28 % dari keseluruhan responden. Selanjutnya untuk mengetahui Tanggapan Responden Mengenai Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan yang Tidak Melakukan Perizinan Pengeboran Air bawah Tanah dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.13
Tanggapan Responden Mengenai Badan Usaha Penginapan Dan Perhotelan Yang Tidak Melakukan Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	27	46
2	Kadang-Kadang	19	33
3	Tidak Pernah	12	21
Jumlah		58	100 (%)

Sumber : Data Olahan 2011.

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tanggapan responden Mengenai Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan yang Tidak Melakukan Perizinan Pengeboran Air bawah Tanah mayoritas mereka mengatakan Selalu yaitu berjumlah 27 Orang atau sekitar 46 % dari keseluruhan jumlah responden, seterusnya diikuti oleh jawaban responden yang mengatakan Kadang-Kadang yaitu sebanyak 19 orang atau 33 % responden, dan yang paling sedikit adalah reponden yang mengatakan Tidak Pernah yaitu sebanyak 12 orang atau 21 % dari keseluruhan jumlah responedn. Kemudian untuk mengetahui Tanggapan Responden Mengenai Ketepatan Waktu Pelaporan Setiap Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan untuk Memperoleh Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah dapat kita lihat dari tabel berikut ini :

Tabel 5.14
Tanggapan Responden Mengenai Ketepatan Waktu Pelaporan Setiap Badan Usaha Penginapan Dan Perhotelan Untuk Memperoleh Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	18	31
2	Kadang-Kadang	19	33
3	Tidak Pernah	21	36
Jumlah		58	100 (%)

Sumber : Data Olahan 2011.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah dalam hal Ketepatan Waktu Pelaporan Setiap Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan untuk Memperoleh Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah yaitu sebanyak 21 orang atau 36 % dari keseluruhan jumlah responden selanjutnya diikuti dengan jawaban responden yang mengatakan Kadang-kadang yaitu sebanyak 19 orang atau 33 %. Sedangkan yang paling sedikit responden mengatakan Selalu yaitu sebanyak 18 orang arau 31 % dari keseluruhan responden. Selanjutnya untuk mengetahui Tanggapan Responden Mengenai Kelengkapan Data dan Informasi yang Diberikan Oleh Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan Kepada BLH dapat kita lihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.15
Tanggapan Responden Mengenai Kelengkapan Data Dan Informasi Yang Diberikan Oleh Badan Usaha Penginapan Dan Perhotelan Kepada BLH

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	16	28
2	Kadang-Kadang	19	33
3	Tidak Pernah	23	39
Jumlah		58	100 (%)

Sumber : Data Olahan 2011.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa, dalam hal Kelengkapan Data dan Informasi yang Diberikan Oleh Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan Kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru mayoritas responden mengatakan

Tidak Pernah yaitu sebanyak 23 orang atau sekitar 39 % dari jumlah keseluruhan responden. Seterusnya diikuti oleh tanggapan responden yang menjawab Kadang-Kadang yaitu sebanyak 19 orang atau 33 %. Sedangkan yang paling sedikit adalah responden yang mengatakan Selalu yaitu sebanyak 16 orang atau sekitar 28 % dari keseluruhan responden. Selanjutnya untuk mengetahui Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Tegas yang Dikenakan Kepada Badan Usaha yang Tidak Mengurus Perzinan Pengeboran Air Bawah Tanah dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.16
Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Tegas Yang Dikenakan Kepada Badan Usaha Yang Tidak Mengurus Perzinan Pengeboran Air Bawah Tanah

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	8	14
2	Kadang-Kadang	21	36
3	Tidak Pernah	29	50
Jumlah		58	100 (%)

Sumber : Data Olahan 2011.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa, dalam hal Pemberian Sanksi Tegas yang Dikenakan Kepada Badan Usaha yang Tidak Mengurus Perzinan Pengeboran Air Bawah Tanah oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah yaitu sebanyak 29 orang atau sekitar 50 % dari jumlah keseluruhan responden. Seterusnya diikuti oleh tanggapan responden yang menjawab Kadang-Kadang yaitu sebanyak 21 orang atau 36 %. Sedangkan yang paling sedikit adalah responden yang mengatakan Selalu yaitu sebanyak 8 orang atau sekitar 14 % dari keseluruhan responden. Selanjutnya untuk mengetahui Rekapitulasi Jawaban Responden Dilihat Dari Indikator Laporan Dari Tempat dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.17
Rekapitulasi Responden Dilihat Dari Indikator Laporan Dari Tempat

No	Soal	Kategori Jawaban			Jumlah responden
		Selalu	Kadang-Kadang	Tidak Pernah	
1	1	19	18	21	58
2	2	16	17	25	58
3	3	27	19	12	58
4	4	18	19	21	58
5	5	16	19	23	58
6	6	8	21	29	58
Jumlah Rata-Rata		17	19	22	58
Persentase (%)		29%	33%	38%	100%

Sumber : Data Olahan 2011.

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat kita lihat dari masing-masing pertanyaan yang telah peneliti berikan kepada responden untuk mengetahui tanggapan responden terhadap Pengawasan BLH dalam hal Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah dari indikator Laporan Dari Tempat, mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah yaitu sebanyak 22 orang atau sekitar 38 % dari keseluruhan jumlah responden. Selanjutnya diikuti oleh responden yang menjawab Kadang-Kadang yaitu sebanyak 19 orang atau sekitar 33 % . Sedangkan yang paling sedikit responden menjawab Selalu yaitu 17 orang atau sekitar 29 %.

Adapun dari hasil penelitian lapangan peneliti mendapatkan informasi dari responden khususnya pada Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan mayoritas dari mereka banyak yang tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengeboran Air Bawah Tanah, hal ini yang kemudian membuat mereka juga tidak melakukan pelaporan untuk mendapatkan perizinan dari pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Selanjutnya laporan pengajuan izin yang selalu terlambat dari pihak Badan Usaha

Penginapan dan Perhotelan juga menjadi masalah yang umum terjadi. Dan yang terakhir dalam hal ini adalah kurangnya sanksi tegas yang diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Kepada Badan Usaha Penginapan dan perhotelan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran pihak badan usaha untuk membuat atau mengajukan Permohonan Izin Pengeboran Air Bawah Tanah.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan Tidak Langsung yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak BLH terhadap pelaksanaan Perizinan Pengeboran air bawah tanah dimana terdapat 2 sub indicator yang dinilai yaitu Pengawasan Tidak Langsung Secara Tertulis dan Pengawasan Tidak Langsung Secara Lisan.

a. Secara Tertulis

Pengawasan Tidak Langsung Secara Tertulis yang dimaksudkan yaitu meliputi tindakan nyata secara tertulis yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru berupa Surat Teguran Bagi Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan yang tidak mengurus perizinan atau yang tidak melakukan perpanjangan izin.

Tabel 5.18
Tanggapan Responden Mengenai Tindakan Nyata Secara Tertulis Oleh BLH Kepada Badan Usaha Yang Tidak Mengurus Perizinan

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	18	31
2	Kadang-Kadang	17	29
3	Tidak Pernah	23	40
Jumlah		58	100 (%)

Sumber : Data Olahan 2011.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa, dalam hal Tindakan Nyata Secara Tertulis Oleh BLH Kepada Badan Usaha Yang Tidak Mengurus Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah yaitu sebanyak 23 orang atau sekitar 40 % dari jumlah keseluruhan responden. Seterusnya diikuti oleh tanggapan responden yang menjawab Selalu yaitu sebanyak 18 orang atau 21 %. Sedangkan yang paling sedikit adalah responden yang mengatakan Kadang-Kadang yaitu sebanyak 17 orang atau sekitar 29 % dari keseluruhan responden. Selanjutnya untuk mengetahui Tanggapan Tanggapan Responden Mengenai Teguran / Peringatan yang dilakukan secara tertulis oleh BLH kepada badan usaha yang tidak mengurus perizinan dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.19
Tanggapan Responden Mengenai Peringatan/Teguran BLH Kepada Badan Usaha yang Tidak Mengurus Perizinan

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	16	27
2	Kadang-Kadang	19	33
3	Tidak Pernah	23	40
Jumlah		58	100 (%)

Sumber : Data Olahan 2011.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa, dalam hal Pemberian Peringatan/Teguran BLH Kepada Badan Usaha yang Tidak Mengurus Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah yaitu sebanyak 23 orang atau sekitar 40 % dari jumlah keseluruhan responden. Seterusnya diikuti oleh tanggapan responden yang menjawab Kadang-Kadang yaitu sebanyak 19 orang atau 33%. Sedangkan yang paling sedikit adalah responden yang mengatakan Selalu yaitu sebanyak 16 orang atau sekitar 27 %

dari keseluruhan responden. Selanjutnya untuk mengetahui Tanggapan Tanggapan Responden Mengenai pengurusan langsung Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan setelah diberikan teguran/peringatan untuk kemudian mengurus perizinan pengeboran air bawah tanah dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.20
Tanggapan Responden Mengenai Badan Usaha Yang Langsung Mengurus Perizinan Setelah Diberikan Surat Teguran

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	14	24
2	Kadang-Kadang	20	35
3	Tidak Pernah	24	41
Jumlah		58	100 (%)

Sumber : Data Olahan 2011.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa, dalam hal pengurusan langsung badan usaha setelah diberikan teguran/Peringatan untuk kemudian mengurus perizinan pengeboran air bawah tanah mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah yaitu sebanyak 24 orang atau sekitar 41 % dari jumlah keseluruhan responden. Seterusnya diikuti oleh tanggapan responden yang menjawab Kadang-Kadang yaitu sebanyak 20 orang atau 35 %. Sedangkan yang paling sedikit adalah responden yang mengatakan Selalu yaitu sebanyak 14 orang atau sekitar 24 % dari keseluruhan responden. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Surat Teguran yang diberikan kepada Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan Kota Pekanbaru yang tidak melakukan perpanjangan izin adalah sebagai berikut :

Tabel 5.21
Tanggapan Responden Mengenai Surat Teguran Dari BLH Kepada Badan Usaha Yang Tidak Melakukan Perpanjangan Izin

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	12	21
2	Kadang-Kadang	21	36
3	Tidak Pernah	25	43
Jumlah		58	100 (%)

Sumber : Data Olahan 2011.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa, dalam hal Pemberian Surat Teguran Dari BLH Kepada Badan Usaha yang Tidak Melakukan Perpanjangan Perizinan pengeboran air bawah tanah mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah yaitu sebanyak 25 orang atau sekitar 43 % dari jumlah keseluruhan responden. Seterusnya diikuti oleh tanggapan responden yang menjawab Kadang-Kadang yaitu sebanyak 21 orang atau 36 %. Sedangkan yang paling sedikit adalah responden yang mengatakan Selalu yaitu sebanyak 12 orang atau sekitar 21 % dari keseluruhan responden. Selanjutnya untuk mengetahui Rekapitulasi Jawaban Responden Dari Sub Indikator Pengawasan Tidak Langsung Secara Tertulis Dapat Kita Lihat Pada Tabel Berikut :

Tabel 5.22
Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Pengawasan Tidak Langsung Secara Tertulis

No	Soal	Kategori Jawaban			Jumlah responden
		Selalu	Kadang-Kadang	Tidak Pernah	
1	1	18	17	23	58
2	2	16	19	23	58
3	3	14	20	24	58
4	4	12	21	25	58
Jumlah Rata-Rata		15	20	23	58
Persentase (%)		26%	34%	40%	100%

Sumber : Data Olahan 2011.

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat kita lihat dari masing-masing pertanyaan yang telah peneliti berikan kepada responden untuk mengetahui tanggapan responden terhadap Pengawasan Tidak Langsung dari BLH dalam hal Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah dari indikator Pengawasan Tidak Langsung Secara Tertulis, mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah yaitu sebanyak 23 orang atau sekitar 38 % dari keseluruhan jumlah responden. Selanjutnya diikuti oleh responden yang menjawab Kadang-Kadang yaitu sebanyak 20 orang atau sekitar 34 % . Sedangkan yang paling sedikit responden menjawab Selalu yaitu 15 orang atau sekitar 26 %.

Dari rekapitulasi tanggapan responden diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung secara tertulis yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah ada Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam melakukan Pengawasan Tidak Langsung Secara Tertulis. Hal ini disebabkan minimnya upaya yang dilakukan oleh pihak BLH untuk mengajak atau menyerukan kepada Setiap Badan Usaha untuk mengurus Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Secara tertulis, hal ini juga yang menyebabkan minimnya pengetahuan dari pihak Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan serta kurangnya kesadaran dari pihak Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan untuk mengurus perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Tersebut.

Dari hasil penelitian dan analisa di lapangan, peneliti melihat Teguran yang diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru tidak menyeluruh kepada semua Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan Kota Pekanbaru yang tidak mengurus maupun yang tidak memperpanjang perizinan pengeboran air bawah tanah. Selain itu hal yang sering terjadi adalah sering terlambatnya Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan yang mengurus perizinan setelah mendapatkan teguran dari Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.

b. Secara lisan

Pengawasan Tidak Langsung Secara Lisan yang dimaksudkan yaitu Penyuluhan kepada Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan tentang perizinan pengeboran air bawah tanah melalui penyuluhan, sosialisasi, seminar-seminar maupun acara-acara lainnya yang bersifat mengajak seluruh Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan di Kota Pekanbaru untuk mengurus perizinan pengeboran air bawah tanah tersebut. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai ada atau tidaknya kegiatan penyuluhan dari pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.23
Tanggapan Responden Mengenai Kegiatan Penyuluhan BLH Tentang Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	12	21
2	Kadang-Kadang	19	33
3	Tidak Pernah	27	46
Jumlah		58	100 (%)

Sumber : Data Olahan 2011.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa, dalam hal kegiatan penyuluhan oleh BLH Kepada Badan Usaha tentang Perizinan pengeboran air bawah tanah mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah yaitu sebanyak 27 orang atau sekitar 46 % dari jumlah keseluruhan responden. Seterusnya diikuti oleh tanggapan responden yang menjawab Kadang-Kadang yaitu sebanyak 19 orang atau 33 %. Sedangkan yang paling sedikit adalah responden yang mengatakan Selalu yaitu sebanyak 12 orang atau sekitar 21 % dari keseluruhan responden. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai ketersediaan anggaran untuk mengadakan kegiatan-kegiatan penyuluhan tentang perizinan pengeboran air bawah tanah dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 5.24
Tanggapan Responden Mengenai Ketersediaan Anggaran Dalam Kegiatan Penyuluhan Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	11	19
2	Kadang-Kadang	21	36
3	Tidak Pernah	26	45
Jumlah		58	100 (%)

Sumber : Data Olahan 2011.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa, dalam hal Ketersediaan Anggaran BLH untuk mengadakan penyuluhan Kepada Badan Usaha tentang Perizinan pengeboran air bawah tanah mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah yaitu sebanyak 26 orang atau sekitar 45 % dari jumlah keseluruhan responden. Seterusnya diikuti oleh tanggapan responden yang menjawab Kadang-Kadang yaitu sebanyak 21 orang atau 36 %. Sedangkan yang paling sedikit adalah responden yang mengatakan Selalu yaitu sebanyak 11 orang atau sekitar 19 % dari keseluruhan responden. Kemudian untuk mengetahui tanggapan

responden mengenai Rutin atau tidaknya Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru melakukan penyuluhan dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 5.25
Tanggapan Responden Mengenai Rutinitas
Penyuluhan Yang Dilakukan Oleh Badan Lingkungan Hidup Terhadap
Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	5	8
2	Kadang-Kadang	23	40
3	Tidak Pernah	30	52
Jumlah		58	100 (%)

Sumber : Data Olahan 2011.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa, dalam hal Rutin atau tidaknya BLH Kota Pekanbaru dalam melakukan penyuluhan tentang Perizinan pengeboran air bawah tanah mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah yaitu sebanyak 30 orang atau sekitar 52 % dari jumlah keseluruhan responden. Seterusnya diikuti oleh tanggapan responden yang menjawab Kadang-Kadang yaitu sebanyak 23 orang atau 40 %. Sedangkan yang paling sedikit adalah responden yang mengatakan Selalu yaitu sebanyak 5 orang atau sekitar 8 % dari keseluruhan responden. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Kerugian / Resiko yang akan terjadi jika Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru tidak melakukan penyuluhan dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.26
Tanggapan Responden Mengenai Kerugian / Resiko Yang Terjadi Jika BLH
Tidak Melakukan Penyuluhan.

No	Kategori Jawaban	Tanggapan Responden	Persentase (%)
1	Selalu	28	48
2	Kadang-Kadang	19	33
3	Tidak Pernah	11	19
Jumlah		58	100 (%)

Sumber : Data Olahan 2011.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa, tanggapan responden mengenai kerugian / resiko yang akan terjadi jika pihak BLH tidak mengadakan penyuluhan tentang perizinan pengeboran air bawah tanah mayoritas responden mengatakan Selalu yaitu sebanyak 28 orang atau sekitar 48 % dari jumlah keseluruhan responden. Seterusnya diikuti oleh tanggapan responden yang menjawab Kadang-Kadang yaitu sebanyak 19 orang atau 33 %. Sedangkan yang paling sedikit adalah responden yang mengatakan Tidak Pernah yaitu sebanyak 11 orang atau sekitar 29 % dari keseluruhan responden. Untuk melihat Rekapitulasi Tanggapan Responden dari indikator Pengawasan Tidak Langsung Secara Tertulis dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.27
Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Pengawasan Tidak Langsung Secara Lisan

No	Soal	Kategori Jawaban			Jumlah responden
		Selalu	Kadang-Kadang	Tidak Pernah	
1	1	12	19	27	58
2	2	11	21	26	58
3	3	5	23	30	58
4	4	28	19	11	58
Jumlah Rata-Rata		14	20	24	58
Persentase (%)		24%	35%	41%	100%

Sumber : Data Olahan 2011.

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat kita lihat dari masing-masing pertanyaan yang telah peneliti berikan kepada responden untuk mengetahui tanggapan responden terhadap Pengawasan Tidak Langsung dari BLH dalam hal Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah dari indikator Pengawasan Tidak Langsung Secara Lisan, mayoritas responden mengatakan Tidak Pernah yaitu sebanyak 24 orang atau sekitar 41 % dari keseluruhan jumlah responden.

Selanjutnya diikuti oleh responden yang menjawab Kadang-Kadang yaitu sebanyak 20 orang atau sekitar 35 % . Sedangkan yang paling sedikit responden menjawab Selalu yaitu 14 orang atau sekitar 24 %. Dari tabel rekapitulasi diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan Tidak Langsung Secara Lisan dinilai Kurang Baik, hal ini dapat kita lihat dari tanggapan responden yang mayoritas mengatakan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Tidak Pernah melakukan pengawasan.

Selain itu dari penelitian lapangan informasi yang peneliti dapat ternyata kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru mengenai Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Hanya Sekali Setelah diberlakukannya Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah. Setelah peneliti melakukan konfirmasi terhadap kebenaran informasi tersebut, ternyata hal ini disebabkan minimnya anggaran untuk kegiatan penyuluhan tersebut.

1.3 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah Di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan yang terdapat pada tabel hasil rekapitulasi pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran air bawah tanah di Kota Pekanbaru, adapun faktor penghambat pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Perizinan Pengeboran air bawah tanah di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia, sehingga sering terjadi kesulitan dalam pengawasan yang dilakukan di lapangan.
2. Minimnya Anggaran dari pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan pengawasan serta pengadaan kegiatan-kegiatan sosialisasi tidak dapat terlaksana karena keterbatasan biaya.
3. Tidak adanya sanksi tegas yang dilakukan BLH kepada Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan, sehingga pelaksanaan pengawasan perizinan juga tidak dapat terlaksana dengan lancar.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan perizinan pengeboran air bawah tanah Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru harus melakukan terobosan atau melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengajukan Anggaran kepada Pemerintah Daerah guna mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada setiap badan usaha yang ada di Kota Pekanbaru tentang Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah.
2. Mengajukan Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk menambah pegawai yang memiliki kapabilitas untuk melakukan pengawasan terhadap setiap badan usaha baik yang sudah memiliki izin maupun yang belum membuat izin.
3. Mengadakan penyuluhan/sosialisasi setiap rutin setiap tahunnya mengenai Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah kepada Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan di Kota Pekanbaru sehingga dapat menambah pengetahuan dan menimbulkan rasa kesadaran diri para pengusaha akan pentingnya mengurus perizinan tersebut.

4. Melakukan pengawasan lapangan dalam kegiatan pengeboran air bawah tanah yang dilakukan oleh Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan tepat pada waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan.
5. Membuat Tim Khusus untuk pembagian tugas dalam melaksanakan pengawasan, sehingga kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara merata keseluruh Kota Pekanbaru.
6. Memberikan sanksi tegas kepada Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan yang tidak mengurus dan yang tidak memperpanjang perizinan pengeboran air bawah tanah.

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada halaman-halaman sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dalam perizinan pengeboran air bawah tanah di kota Pekanbaru belum optimal, hal ini disebabkan oleh banyaknya Badan Usaha khususnya Badan Usaha Penginapan Dan Perhotelan Kota Pekanbaru yang melakukan pengeboran Air Bawah Tanah tanpa diiringi izin dari pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.

Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia, sehingga sering terjadi kesulitan dalam pengawasan yang dilakukan di lapangan.
2. Minimnya anggaran dari Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaan pengawasan serta pengadaan kegiatan-kegiatan sosialisasi tidak dapat terlaksana karena keterbatasan biaya.
3. Tidak adanya sanksi tegas yang dilakukan BLH kepada Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan, sehingga pelaksanaan pengawasan perizinan juga tidak dapat terlaksana.

1.2 Saran

Setelah melihat hasil dalam penelitian ini maka, penulis memberikan saran– saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya upaya yang serius dari Pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam memperhatikan dan melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang pentingnya pengurusan prizinan Pengeboran Air Bawah Tanah kepada Seluruh Badan Usaha Khususnya Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan di Kota Pekanbaru.
2. Perlunya suntikan anggaran yang memadai dari Pemerintah Daerah agar kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya pengurusan Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah oleh setiap Badan Usaha Khususnya Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan di Kota Pekanbaru.
3. Hendaknya tercipta hubungan kerja sama antara Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Pemerintah Daerah dan Seluruh Badan Usaha khususnya Badan Usaha Penginapan dan Perhotelan di Kota Pekanbaru, seHINGA kegiatan-kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dapat berjalan dengan Baik demi menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2004. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Jakarta : CV. Eka Jaya.
- As ad, Moch. 2000. Psikologi Industri. Yogyakarta : Liberti.
- Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan. 2003. Peta Hidrogeologi Indonesia Lembar 0816 Pekanbaru. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Bandung.
- Hamid, Hamrat dan Bambang Pramudyanto. 2007. Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Edisi I. Jakarta : Granit.
- Kadarman. 2001. Sistem Pengawasan Management. Jakarta : Pustaka Quantum.
- Kansil, C.S.T. 2001. Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika
- Keban, Yaremis T. 2001. Enam Dimensi Administrasi Publik. Jakarta : Gava Media.
- Manulang, M. 2001. Dasar Dasar Managemen. UGM.
- Mustafa, Hasan. 2000. Membidik Pasar Indonesia. Jakarta : PT Gramedia.
- Pasolong, Herbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfa Beta.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. 2004. Pengelolaan air Bawah Tanah.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. 2008. Tugas Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.
- Sastradipuetra, Kamaruddin. 1994. Pengantar Management Perusahaan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sechan, E. 1977. Fundamentals of Hydrology. Geographic Published. Institute des Kijksuriversal, Utreech.
- Suandhi, 2005. Kajian Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Pekanbaru dalam Kaitannya dengan Tingkat Kepuasan Pelanggan dan Minat Masyarakat untuk Berlangganan. Tesis. Universitas Gadjahmada, Yogyakarta.

Siagian, SP. 2001. Management Sumber Daya Manusia. Jakarta : Cipta Radar
Jaya Offset.

Siagian, SP. 2002. Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja. Jakarta : Rineka
Cipta.

Swasta, Basu. 1996. Azas-azas Marketing. Jakarta : Liberty.

Sugiono.2003. Statistik Untuk Penelitian. Bandung : Alfa Beta.

Sugiono.2006. Metode Penelitian Administrasi.Bandung : Alfa Beta.

Sutrisno, C. T. dan E. Suciastuti. 1997. Teknologi Penyediaan Air Bersih.
Jakarta : Rineka Cipta.

Winardi. 2000. Kepemimpinan Dalam Management. Jakarta : Rineka Cipta.